

RUSUH PEMILU, TAK AKAN!



Oleh: Adrianus Meliala

MENJELANG pemungutan suara legislatif yang sudah diujung pintu, masih terdapat satu kekhawatiran. Apakah keberhasilan besar Pemilu 2004 akan terulang kembali? Kini, dengan persiapan pengamanan yang jauh lebih baik dilakukan oleh Polri dan berbagai unsur keamanan lainnya, ternyata ada beberapa faktor yang nampaknya berkembang diluar kendali.

Faktor pertama adalah penampilan Komisi Pemilihan Umum yang, secara langsung ataupun tidak, telah menjadikan Pemilu 2009 ini penuh sesak dengan peserta dan proses persiapannya selalu berjalan terlambat dari rencana. Belum lagi adanya berbagai kinerja yang salah dan tidak standar.

Faktor kedua, adalah krisis ekonomi dunia yang dimulai akhir tahun lalu dan semakin menampakkan dampaknya baik di dunia maupun Indonesia hari-hari ini. Resesi yang mengakibatkan 40 ribuan pekerja sektor garmen kini telah mengalami pemutusan hubungan kerja akan terus berlanjut hingga diperkirakan 3-4 juta orang Indonesia akan bernasib sama. Sebagaimana dikhawatirkan, orang-orang yang lapar dan bingung cenderung mudah diajak berbuat apa saja.

Namun demikian, posisi tulisan ini tidaklah untuk percaya bahwa pemilu kali ini, baik saat pelaksanaan maupun sesudahnya, akan dihiasi aneka konflik

yang berdarah dan mengkhawatirkan. Sebaliknya, penulis memilih tesis bahwa tidak akan ada konflik yang mengkhawatirkan terkait Pemilu 2009.

BENCHMARK

Cukup banyak yang mengatakan Pemilu 2004 adalah benchmark bagi Indonesia dan dunia. Itulah pemilu demokratis pertama yang melibatkan puluhan juta pemilih dan dilakukan dalam beberapa tahapan. Olehkarenanya, tak ada pemilu *se-ribet* dan *se-heboh* pemilu di Indonesia. Namun demikian, 'toh pemilu berlangsung tanpa pertumpahan darah dan tanpa kasus-kasus pelanggaran berat.

Pengalaman tersebut mengindikasikan tebalnya kapital sosial yang dimiliki bangsa ini. Dengan cara lain, Pemilu 2004 adalah gambaran dari bangsa yang sebenarnya tidak suka konflik dan kekerasan sepanjang aturan diberlakukan dengan tegas dan tidak memihak oleh aparat yang bertugas. Kapital sosial itu diharapkan kembali lagi bekerja pada pemilu kali ini.

MASSA KTI - DHARMA - WASPADA

Jika dilihat pengalaman selama ini terkait pemilu dan kerusuhan, maka sumbangan terbesar datang dari kegiatan kampanye parpol. Saat ribuan atau bahkan puluhan ribu simpatisan berkumpul di siang hari bolong dengan menaiki kendaraan bermotor guna mendengarkan kampanye, banyak hal bisa terjadi. Massa yang heringas karena lapar atau karena terprovokasi oleh juru kampanye yang militan, bisa juga karena bersinggungan dengan massa dari parpol lain, ujung-ujungnya melahirkannya anarki.

Pemilu 2009 ini sesungguhnya menghilangkan hal itu. Tidak dengan cara menghilangkan kampanye terbuka, tetapi dengan "menggerogoti" jiwa massa. Ini berawal dari keputusan Mahkamah Konstitusi tentang tidak berlakunya

nomor urut caleg. Hal ini menjadikan setiap caleg bertarung dengan sesama caleg dalam partainya sendiri. Sekaligus, hal ini menjadikan tidak fokusnya upaya caleg mendukung partai melalui pengerahan massa, penyebaran informasi partai, pendanaan bagi kas partai dan sebagainya.

Massa yang terbentuk dalam kampanye dewasa ini, dengan demikian, tak lebih dari kumpulan kelompok-kelompok pendukung caleg-caleg tertentu. Akibatnya, tidak ada jiwa massa yang, dalam khasanah psikologi kelompok, bisa menghasilkan kekuatan destruksi yang luar biasa.

FINANSIAL

Masa kampanye yang panjang, yakni sejak Juli 2008, sebenarnya menguntungkan dari segi tidak terkonsentrasinya penumpahan kapital milik caleg atau organisasinya pada satu-dua mata kegiatan kampanye saja dan dalam periode waktu yang pendek pula. Itulah praktek yang terjadi hingga tahun 2004 dan pernah menjadikan Jakarta hampir sepenuhnya "merah", "hijau" atau "kuning".

Dengan masa kampanye yang panjang dewasa ini, para caleg tentu tidak perlu jor-joran menggaet pemilih. Walaupun ingin habis-habisan pada beberapa hari terakhir menjelang pemungutan suara, dana yang tersisa diperkirakan sudah semakin terbatas. Bahkan, sebagaimana mulai disinyalir, banyak caleg berhutang kiri-kanan atau bahkan terlibat dalam berbagai tindak kejahatan. Masa kampanye yang panjang itu, dengan demikian, bisa menjadi pedang bermata dua bagi caleg yang tidak pandai mengatur keuangan atau yang terbatas uangnya.

TERBIASA

Terdapat pula kemungkinan lain yang untungnya, bisa semakin menjauhkan Pemilu 2009 dari kemungkinan konflik.



Sebagaimana kita ketahui, di Indonesia tercatat hampir 500 pilkada dan 1 pemilu yang terjadi setiap 5 tahun. Dengan kata lain, kegiatan memilih atau eleksi bukan lagi barang baru. Minimal, secara pemberitaan, kegiatan terkait aktivitas eleksi selalu muncul di media untuk kemudian secara diam-diam dipelajari.

Bisa dipastikan bahwa memori yang telah terjadi akibat pengalaman-pengalaman sebelumnya saat mengikuti Pemilu 2004 maupun pilkada di daerah masing-masing akan membantu para pemilih pada pemilu kali ini untuk terhindar dari kesalahan-kesalahan administratif. Memori tersebut akan mencegah masyarakat untuk mencontreng dua kali atau mencontreng di luar kotak.

Kalangan yang sudah mulai mengembangkan kebiasaan atau *habit* guna memilih ini juga telah memiliki referensi apabila hendak diajak mengikuti kegiatan-kegiatan massa yang selalu berpotensi menimbulkan, minimal, gangguan kemacetan di jalan raya. Kognisi yang

sudah terisi membuat kalangan ini tidak gampang lagi dibujuk rayu dengan uang beberapa puluh ribu rupiah.

GOLPUT

Namun demikian, kondisi keterbiasaan tersebut bisa juga membawa sesuatu yang negatif. Sebagaimana disinyalir, ada cukup banyak kalangan yang merasa bosan dengan mekanisme ala eleksi dimana sebelum eleksi dilakukan ada beribu-ribu janji. Tetapi, segera setelah suara diberikan, janji-janji itu tak ada lagi. Belum lagi menyadari perilaku anggota legislatif yang telah mereka pilih pada Pemilu 2004 lalu.

Kalangan yang memutuskan tidak mau memberikan suara tersebut, disebut juga golongan putih atau "golput", olehkarena itu diperkirakan akan semakin besar. Dalam hal itu, akan semakin besar pula kalangan yang ogah terjun dalam konflik pasca pemilu. Kalangan yang apatis ini tentu saja akan amat berjarak apabila hendak diajak berkonflik.

TIDAK SERIUS

Kalaupun konflik ternyata benar-benar terjadi, maka konflik tersebut nampaknya tidak akan besar, berlangsung dalam skala lokal dan memiliki beberapa kontur sebagai berikut:

Pertama, khususnya bila terjadi selisih suara yang tipis antara yang menang dan yang kalah.

Kedua, khususnya bila terjadi pemicu (*trigger factors*) berupa anggota KPU salah omong, pihak incumbent terlalu bernafsu dan sebagainya.

Ketiga, apabila yang menang adalah caleg yang kontroversial, tidak diperhitungkan, kuda hitam

Keempat, apabila aparat keamanan dan aparat hukum ketahuan berpihak.

Dengan menyadari empat hal di atas, Polri dalam hal ini tentunya bisa berupaya sejak dini guna mencegah konflik Pemilu 2009 dan pasca pemilu tidak akan terjadi.

Adrianus Meliala
Kriminolog UI